

# **ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS *WEBSITE* PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN**

Lucia Julisa Prihatin  
Irwan Taufiq Ritonga, M.Buss, Ph.D, C.A.  
Email: lucia.julisa.p@mail.ugm.ac.id

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta 55281, Indonesia

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 61 pemerintah daerah di Kalimantan dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing *website* resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik tahun 2015 maupun 2016, indeks transparansi tertinggi diraih Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kabupaten Mahakam Hulu menjadi pemerintah daerah dengan indeks transparansi terendah. Dari 61 *website* resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah sebesar 12,67% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,42% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (*insufficient*).

Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah: (1) jumlah penduduk, (2) total aset pemerintah daerah, (3) jumlah anggota DPRD, (4) umur administratif pemda, (5) rasio PAD, (6) total belanja daerah, (7) opini audit BPK, (8) Indeks Pembangunan Manusia dan (9) *press visibility*

Kata kunci: transparansi, *good governance*, pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah

## PENDAHULUAN

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah yang juga merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasminta, 2010).

Kierkegaard (2009) dalam Bertot, dkk (2010) menyatakan bahwa “*transparency ultimately serves to keep government honest – good government must be seen to be done*”. Suatu pemerintah daerah dengan kepala daerah yang menjunjung transparansi dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.

Terbitnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disusul Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) memandatkan kepada gubernur/bupati/walikota untuk lebih terbuka daerah menyajikan informasi transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut di *websitenya*. *Website* berbasis internet merupakan sarana yang cukup efektif untuk mengumumkan informasi kepada publik.

Di sisi lain, komitmen pemerintah dengan mengeluarkan regulasi tersebut hanya sebatas instrumen. Tidak adanya pengukuran, peneringkatan dan sanksi yang diterapkan juga membuat pemerintah daerah cenderung

kurang peduli dalam penerapan transparansi sehingga tidak ada semangat berkompetisi untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik yang berakibat rendahnya transparansi di tubuh pemerintah.

Penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya telah dilakukan. Penelitian ini bermaksud memotret pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2015 dan 2016. Penelitian ini mengacu pada penelitian Syamsul (2017) dengan melakukan pengukuran dan peneringkatan transparansi pada pemerintah daerah di Kalimantan pada level pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Kalimantan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Secara sederhana, teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan atau pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul ketika ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Dalam sektor publik, teori keagenan ini berupa hubungan kontrak yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara *principals* yakni pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada proses pendelegasian wewenang terdapat hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*, legislatif

sebagai *principal* dengan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan juga antara masyarakat sebagai *principal* dengan legislatif sebagai *agent*.

Terdapat dua masalah dalam hubungan prinsipal dan agen yaitu (Gudono, 2014).

1. Pilihan buruk (*adverse selection/negative selection*), yang terjadi ketika prinsipal tidak mengetahui kemampuan agen sehingga terjemurus dalam membuat pilihan yang buruk mengenai agen.
2. Bencana moral (*moral hazard*) terjadi ketika agen yang sadar memiliki keunggulan informasi tidak memenuhi ketentuan kontrak yang sudah disetujui dengan prinsipal.

Masalah-masalah tersebut mengakibatkan sebuah pemerintahan menanggung biaya keagenan yang cukup besar, dalam rangka mengawasi dan memastikan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat selaku prinsipal. Oleh karena itu, untuk menekan biaya keagenan dan meningkatkan hubungan tersebut mendorong pemerintah daerah secara sukarela dalam mengungkapkan informasi yang memungkinkan pemantauan atas tindakan mereka.

### ***Konsep Good Governance***

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari perbaikan organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi (Sarundajang, 2005).

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

### **Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo 2006). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di dalam Kerangka Konseptual (KK), menyatakan bahwa:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Ketersediaan bagi publik atas informasi komprehensif mengenai sektor keuangan publik yang dipublikasikan pada waktu tertentu merupakan salah satu prinsip transparansi (*International Monetary Fund*, 2001).

### **Transparansi Pelaporan Keuangan Berbasis Website**

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling *cost effective* bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan *online* (Style dan Tennyson, 2007). Fenomena pengembangan praktek pelaporan online termotivasi oleh perkembangan *world wide web* sejak tahun 1994 dan internet menjadi media pertama dalam pelaporan *online*. Selain itu, penggunaan *website* dan teknologi informasi ini juga merupakan aplikasi dari penerapan *e-government* yang akan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di masa mendatang (Moon, 2002).

### **Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa dokumen yang diunggah dalam *website* resmi pemerintah daerah pada 61 pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di Kalimantan.

Instrumen transparansi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan Syamsul (2017) yang merupakan modifikasi dari instrumen penelitian Huwae (2016). Penilaian pada tahap perencanaan APBD terdiri dari 10 indikator, tahap pelaksanaan APBD terdiri dari 9 indikator dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBD terdiri dari 10 indikator.

Setelah menetapkan 29 indikator, indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dengan cara sebagai berikut:

- (1) Pengukuran menggunakan skor dikotomi. Jika item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu diberi nilai 0. Untuk kriteria frekuensi pengungkapan, apabila item tidak tersedia akan diberi nilai 0, apabila item tersedia dalam satu tahun akan diberi nilai sepertiga, item tersedia dalam dua tahun akan diberi nilai dua pertiga sedangkan apabila item tersedia dalam tiga tahun berturut-turut akan diberi nilai 1.
- (2) Skor yang diperoleh untuk setiap kriteria masing-masing dikalikan 0,25
- (3) Skor yang diperoleh setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor

total untuk setiap pemerintah daerah/kota.

- (4) Tingkat transparansi dihitung dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator.
- (5) Setelah tingkat transparansi diketahui, selanjutnya seluruh pemerintah kabupaten/kota tersebut diperingkat dengan membandingkan tingkat transparansinya masing-masing.
- (6) Transparansi pengelolaan keuangan daerah kemudian diperingkat berdasarkan Open Budget Index (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan International Budget Partnership (IBP).
- (7) Setelah dilakukan penilaian, pemeringkatan dan pengkategorian, langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi karakteristik-karakteristik pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan yang memiliki tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada lampiran 1.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengukuran Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dari 61 pemerintah daerah di Kalimantan, secara keseluruhan 61 pmda tersebut memiliki *website*

resmi, aktif dan dapat dijadikan obyek penelitian.

#### 1.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap perencanaan, baik untuk tahun 2015 maupun 2016 digunakan 10 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian, skor rata-rata untuk tahap perencanaan di tahun 2015 adalah sebesar 13,10 dan di tahun 2016 adalah sebesar 7,55. Informasi yang paling banyak tersedia untuk tahap ini di tahun 2015 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan untuk tahun 2016 ialah informasi peraturan daerah tentang APBD. Sebaliknya, indikator yang paling sedikit dipenuhi untuk tahun 2015 dan 2016 ialah informasi mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran.

#### 1.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap pelaksanaan, baik untuk tahun 2015 maupun 2016 digunakan 9 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian, skor rata-rata untuk tahap pelaksanaan di tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 17,26 dan 15,83. Dokumen yang paling banyak tersedia untuk tahap ini adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sebaliknya, indikator yang paling sedikit dipenuhi ialah

informasi mengenai SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### 1.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tahun 2015 menggunakan 10 indikator dan tahun 2016 menggunakan 8 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dan Opini BPK Tahun 2015 tidak diikutsertakan dalam penghitungan karena hingga penelitian ini berakhir, kedua dokumen tersebut belum tersedia. Berdasarkan penelitian, dokumen yang paling banyak tersedia untuk tahap ini adalah informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah. Sebaliknya, indikator yang paling sedikit dipenuhi ialah informasi mengenai Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah.

#### 1.4 Pemingkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah diperoleh indeks transparansi yang merupakan hasil dari pengukuran, kemudian dilakukan pemingkatan berdasar indeks transparansi

tertinggi hingga terendah. Untuk tahun 2015, tiga pemda yang menduduki peringkat teratas peraih indeks transparansi tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan tiga pemda di posisi terendah adalah Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang dan Kabupaten Mahakam Hulu. Untuk tahun 2016, tiga pemda yang menduduki peringkat teratas peraih indeks transparansi tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan tiga pemda di posisi Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang dan Kabupaten Mahakam Hulu . Secara akumulatif, nilai rata-rata indeks transparansi di Kalimantan untuk tahun 2015 ialah sebesar 12,67% dan turun menjadi 9,42% di tahun 2016

## **2. Pengategorian tingkat transparansi berdasarkan Open Budget Index (OBI)**

Pengategorian tingkat transparansi pemda di Kalimantan berdasarkan Open Budget Index (OBI) menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Untuk tahun 2015, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan yang ditelusuri *website*-nya tergolong dalam peringkat

keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*). Satu pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi terbatas (*limited*), 12 pemerintah daerah termasuk dalam kualifikasi minimal (*minimal*), dan 48 pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi sedikit (*scant or none*).

- b. Untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan dikategorikan dalam peringkat keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*). Terdapat satu pemerintah daerah yang termasuk dalam kualifikasi terbatas (*limited*), lima pemerintah daerah dikategorikan kualifikasi minimal (*minimal*), sedangkan sisanya, sebanyak 51 pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi sedikit (*scant or none*).

Hal ini menunjukkan meskipun berbagai peraturan perundangan terkait kewajiban mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dan dokumen apa saja yang perlu diungkapkan telah ditetapkan, belum seluruh pemerintah daerah bersedia dan mampu mengimplementasikannya.

## **3. Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah**

Pengidentifikasian bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang membedakan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh predikat tertinggi dan terendah. Pengidentifikasian dilakukan pada tiga kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan tiga kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah. Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mencari data dan informasi terkait kondisi pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengidentifikasian dilakukan pada sembilan aspek yaitu: jumlah penduduk, total aset pemerintah daerah, jumlah anggota DPRD, umur administratif pemda, rasio PAD, total belanja daerah, opini audit BPK, Indeks Pembangunan Manusia dan *press visibility*.

Berdasarkan hasil pengidentifikasian karakteristik pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dengan yang terendah, secara umum tiga pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: ukuran legislatif yang lebih besar, kompleksitas pemerintah daerah yang lebih besar, ukuran pemerintah daerah yang lebih besar, umur administrasi yang lebih tua,

opini atas LKPD yang lebih tinggi, kekayaan pemerintah daerah yang lebih besar, belanja daerah yang lebih besar, *press visibility* yang lebih besar, indeks pertumbuhan manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan yang tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah 12,67 pada tahun 2015 dan mengalami penurunan menjadi 9,42 di tahun 2016 dari nilai indeks maksimal sebesar 100%. Hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*). Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah ialah : (1) jumlah penduduk, (2) total aset pemerintah daerah, (3) jumlah anggota DPRD, (4) umur administratif pemda, (5) rasio PAD, (6) total belanja daerah, (7) opini audit BPK, (8) Indeks Pembangunan Manusia dan (9) *press visibility*.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini dengan menggunakan empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan dan hanya dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan sehingga belum memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan di Indonesia,
  2. Bobot untuk masing-masing kriteria pengukuran masih sama yakni 0,25, penulis tidak melakukan *in depth interview*, validitas ahli serta *focus group discussion* sehingga belum dapat menentukan kriteria mana yang dianggap paling penting,
  3. penelitian yang dilakukan hanya melakukan pengidentifikasian karakteristik transparansi berdasarkan tinjauan pustaka, penulis tidak melakukan *in depth interview* dan *focus group discussion* mengenai pengaruh di pemerintah daerah.
- b. Bagi pemerintah daerah dengan indeks transparansi terendah diharapkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan di seluruh tahapan pengelolaan keuangan serta melengkapi empat kriteria pengukuran secara lengkap agar mudah diakses oleh masyarakat dan dilaksanakan secara tepat waktu.
  - c. Bagi seluruh pemerintah daerah yang masih berada di kategori tidak cukup (*insufficient*) pada hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) hendaknya dokumen pengelolaan keuangan daerah dapat dipublikasikan untuk umum sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara lengkap demi tata kelola pemerintah yang baik.
  - d. Bagi kepala daerah di Kalimantan agar meningkatkan komitmen untuk melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan daerah, misalnya dengan membentuk tim teknis untuk mengelola *website* dan menyediakan alokasi dana khusus dalam mengembangkan *website* resmi pemerintah daerah.

### **Rekomendasi Penelitian**

Beberapa rekomendasi praktis yang dapat diambil terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah di antaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah
  - a. Bagi pemerintah daerah yang telah memiliki *website* resmi, hendaknya menampilkan informasi terkait transparansi keuangan daerah pada *website* resmi secara lengkap, mudah diakses, dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu.
2. Bagi Kementerian Dalam Negeri
  - a. Dapat melakukan pengukuran dan pemeringkatan atas transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh

- pemerintah daerah sehingga termotivasi untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih baik.
- b. Memberikan sanksi dan penghargaan kepada pemerintah daerah agar saling berkompetisi untuk mewujudkan transparansi sehingga dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah sebaik mungkin.
3. Bagi DPRD  
Diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk memantau penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah.
  4. Bagi Masyarakat  
Diharapkan masyarakat dapat menggunakan haknya untuk mengakses informasi publik sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan atas APBD, serta memastikan bahwa anggaran telah dialokasikan dan dilaksanakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertot, John C, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. 2010. *Using ICT to Create a Culture of Transparency : E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies*. Government Information Quarterly. Vol 00659.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Balikpapan Dalam Angka 2016*. Bojonegoro: BPS Kota Balikpapan.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2016*. Trenggalek: BPS Kabupaten Bulungan.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2016*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2016*. Bandung: BPS Kabupaten Kayong Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka 2016*. Palangkaraya: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Angka 2016*. Samarinda: BPS Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Mahakam Hulu Dalam Angka 2016*. Samarinda: BPS Kabupaten Mahakam Hulu.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Singkawang Dalam Angka 2016*. Yogyakarta: BPS Kota Singkawang.
- Cresswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dewi, Annasia, S, dan Haryanto. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Goverment (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia)". *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Vol:2. No:4.
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE.

- Harnowati, Azzati. I. P. 2017. "Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia". Tesis Gelar Master. Universitas Lampung.
- Hennink, M., I. Hutter, dan A. Bailey. 2010. *Qualitative Research Methods*. California: Sage Publications.
- Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. "E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web". *3rd. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*. Vol. 27, pp. 194-199.
- Huwae, K. 2016. "Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Tesis. Magister Akuntansi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live." Diakses pada 20 Februari 2017. <http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>
- International Monetary Fund, *Manual on Fiscal Transparency*, Fiscal Affairs Department, 2007.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. "Rapor Akuntabilitas Kinerja KL dan Provinsi Meningkatkan" diakses dari <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat>, pada tanggal 23 februari 2017 pukul 11.47
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.
- Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol.:60, No:3.
- Martani, Dwi and Annisa Lestiani. 2012. "Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia". *Global Review of Accounting and Finance*. Vol.:3. No:1.
- Moon, M. Jae. 2012. The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*. Vol. 62, No. 4, pp. 424-433.
- Nosihana, Ariefia, dan Rizal Yaya. 2016. "Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol : 3. No: 2. UMY.
- Puspita, Rora, dan Dwi Martani. 2012. "Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik PEMDA Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam *Webiste* PEMDA". Universitas Indonesia.
- Pratama, Kadek, Aris, Dwi, Desak Nyoman Sri Werastuti, dan Edy Sujana. 2015. "Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013)". *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol:3, No:1. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.

- Purwanto, Arie. 2007. "Rancangan dan Implementasi Model Pemeriksaan Kinerja Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Aplikasi E-Government Di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sragen". *Tesis*. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-Government*.
- Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Yang Baik.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Rini, Rini, dan Liska Damianti. 2017. "Analisis Hasil Audit Pemerintah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol:4. No:1. Unsyiah.
- Sarundajang. 2005. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Kata Hasta Pustaka.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung:Mandar Maju
- Sekaran, Uma dan R. Bougie. 2013. *Research Methods for Business*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Setyaningrum, Dyah, dan Febriyani Syafitri. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik

- Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol:9. No:2. UI.
- Styles, A. K., dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol.:9, No:1, pp. 56-92.
- Sujono dan H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Tesis*. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Wikipedia a. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara”. Diakses pada 2 Maret 2017. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Kalimantan\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Utara).
- Wikipedia b. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur”. Diakses pada 2 Maret 2017. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Kalimantan\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Timur)
- Wikipedia c. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan”. Diakses pada 2 Maret 2017. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Kalimantan\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Selatan)
- Wikipedia d. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah”. Diakses pada 2 Maret 2017. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Kalimantan\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Tengah)
- Wikipedia e. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat”. Diakses pada 2 Maret 2017. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Kalimantan\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Barat).

## Lampiran 1

### Indikator Pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahap Perencanaan	Tahap Pelaksanaan	Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
Informasi Kebijakan Umum Anggaran	Informasi Realisasi Belanja Daerah	Informasi Laporan Arus Kas
Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD
Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Informasi Neraca
Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Informasi CaLK Pemerintah Daerah
Informasi Peraturan Daerah tentang APBD	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Informasi Rencana Umum Pengadaan	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
Informasi Ringkasan DPA SKPD	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Informasi Ringkasan DPA PPKD		Informasi Opini BPK RI